

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Barda Nawawi Arief, 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , 2008. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister UNDIP.
- Choky Risda Ramadhan, 2015. "*Jalur Khusus & Plea bargaining*", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI.
- , 2024. *Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Inara Publisher.
- Edward Elgar, 2006. *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Inc.
- Febby Mutiara Nelson, 2019. *Plea bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta Ali, 2012. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Jakarta: Alumni.
- Igor dan Ivana, 2010. *Plea bargaining: A Challenging Issue in the Law and Economics*, Faculty of Law, J.J. Strossmayer University of Osijek, Osijek.
- Jan Crijns, *Kesepakatan Dengan Saksi Dalam Proses Pidana Kesepakatan Dengan Saksi Dalam Peradilan Pidana Belanda Dan Pelajaran Yang Mungkin Dapat Dipetik oleh Indonesia*, dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings (eds). *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar; Universitas Indonesia, Jakarta; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012.

John Henry Merryman and Rogelio Perez-Perdomo, 2023. *The Civil law Tradition*, Stanford University Press, hal. 127.

Kurniawan Tri Wibowo, 2021. *Plea bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.

Lilik Mulyad, 2015. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT Alumni, Bandung.

Lukman Hakim, dkk., 2020. *Penerapan Konsep "Plea bargaining" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Maidina Rahmawati, dkk., 2022. *Peluang dan Tantangan: Penerapan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

Noor Rohmat, 2024. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Regina Rauxloh, 2012. *Plea bargaining in National and International Law*. London: Penerbit Routledge.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

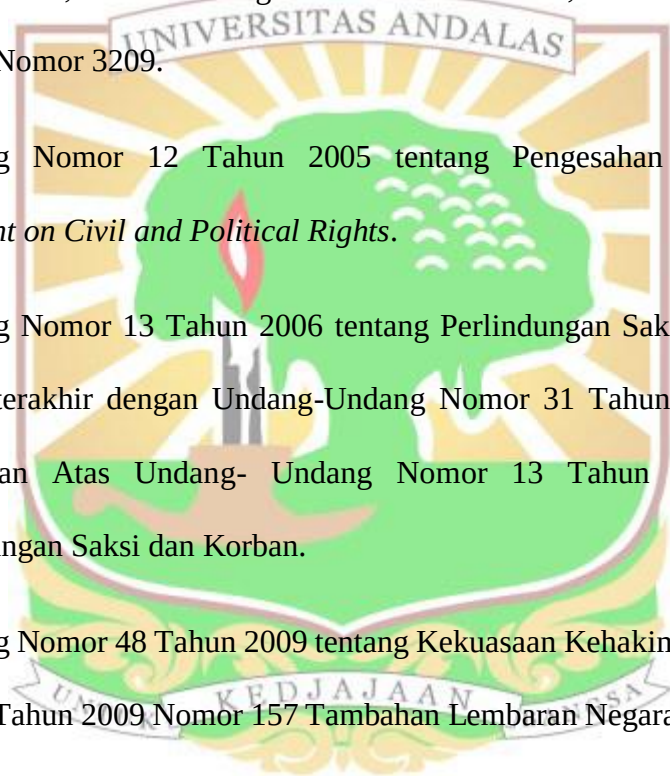
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 6842.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Nomor 188.

JURNAL

Aby Maulana. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek *Plea bargaining* di Beberapa Negara". *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta,.Vol. 3, No.1, (2015).

Albert Alschuler. "Plea Bargaining and Its History" *Colombia Law Review*. Vol.79, No.1 (1979).

-----". "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Tawar Menawar Pembelaan", *The University of Chicago Law Review*, 36 (1). (1968).

Casey M. Burns. "Tawar Menawar Pembelaan:Praktik Kenyamanan atau Sistem Pemaksaan yang Melewati Batas?". *Jurnal Advokasi dan Hukum Stetson*. (2018).

Chinwe A. Mordi. "Penggunaan Plea Bargain dalam Hukum Pidana Nigeria". *Tinjauan Hukum Beijing*. 9. (2018).

Choky R. Ramadhan, dkk. "Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara". *Jurnal Teropong, MaPPI FHU*. Vol. 3, (2015).

Douglas Savitsky. "Is Plea bargaining a Rational Choice? Plea bargaining as An Engine of Racial Stratification and Overcrowding in the United States Prison System". *Sage Journals*, Vol. 24, Issue 2, (2012).

George Fisher,, "Plea Bargaining's Triumph," *Yale Law Journal*, Volume 109, Number 857, (2000).

Hazel B. Kerper. "Introduction to the Criminal Justice System". *Second ed*, West Publishing Company.

Illyin Sekar Putri, dkk., "Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus Enron Corporation)". *Journal of Business and Halal Industry*. Vol 1, No 4. (2024).

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Peneletian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7. No. 1. (2020).

Ladito R. Bagaskoro. "Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Arena Hukum*, Volume 14, Nomor 10, (2021).

Maximo Langer. "Plea bargaining, Trial-Avoiding Conviction Mechanisms and the Global Administratization of Criminal Convictions. *In Annual Review of Criminology*". (2021).

Michael Beenstock, Josh Guestzkow, Shir Kamenetsky Yadan. "Plea bargaining and The Miscarriage of Justice", *Journal of Quantitative Criminology*, (2021).

Muh Ersandi, dkk. "Perbandingan Efektifitas dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang Mengalami *Overcrowded* di Negara Indonesia dan Brazil". *Unes Law Review*. (2024).

Nika Tskhvarashvili. "Bentuk-Bentuk Percepatan Keadilan". *Law and World Journal*, Vol. 10 .7 No. 31. (2024).

Rifi Hermawati. “Studi Perbandingan Hukum “*Plea bargaining System*” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia”. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.1. (2023).

Sagey P. Alpert, “The American System of Criminal Justice Vol. 1: Law and Criminal Justice Series”, Beverly Hills: Sage Publication, (1985).

Stephanos Bibas, “Plea Bargaining Outside the Shadow of Trial,” *Harvard Law Review*, Volume 117, Number 8, (2004).

Stephanos Bibas, “Regulating the Plea-Bargaining Market: From Caveat Emptor to Consumer Protection”, in *California Law Review*, Volume 99 Number 4, (2011).

William T. Pizzi & Luca Marafioti, “The New Italian Code of Criminal Procedure: The Difficulties of Building an Adversarial Trial System on a *Civil law* Foundation”, in *Yale Journal of International Law*, Volume 17 Number 1, (1992).

DOKUMEN

Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Dokumen Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh. Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Indonesia 10110.

Dokumen Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat. Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Indonesia 10110.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A. Jl. Raya Permata No. 06 Gresik.



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A:

PATUAH (Profesional, Akuntabel, Transparan, Unggul, Amanah, Humanis). Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Padang.

Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tertanggal 11 Desember 2012.

Surat Edaran Nomor: Se/ 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Savara Umaira Hanasia. 2023. “Urgensi Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Jalur Khusus di RKUHAP Ditinjau dari Asas *Non Selfincrimination*: Perbandingan dengan *Plea bargaining* di Malaysia dan Amerika”. *Skripsi*. Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Daniel Tulus Sihotang. 2014. *“Lembaga Plea bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Febby Mutiara Nelson, 2019. *“Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea bargaining dan Deffered Prosecution Agreement.”* Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

INTERNET

Cronell Law School. *“Legal Information Institute: Jury Deliberation”*, diakses pada 20 Oktober 2025 Pukul 13.00 di halaman https://www.law.cornell.edu/wex/jury_deliberation

Hukum Online. *“Menilik Praktik Plea Bargain di Amerika Serikat”*. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 16.00 WIB di halaman <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-praktik-plea-bargain-di-amerika-serikat-lt61d47796634ea/?page=2>

Hukum Online. *“Reformasi Peradilan: Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”*. Diakses pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 15.30 WIB di halaman <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>

Hukum Online, *“Plea bargaining Warna Baru Sistem Peradilan Pidana Indonesia,”* diakses pada 25 Agustus 2025 pada pukul 20.00 WIB di halaman <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargaining--warna-baru-sistem-peradilan-pidana-indonesia-lt68830285ef318/>

Hukum Online, “*Prof Harkristuti Tegaskan Pentingnya Pengaturan Judicial Scrutiny dalam RUU KUHP*,” Diakses pada 25 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB di halaman <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-harkristuti-tegaskan-pentingnya-pengaturan-judicial-scrutiny-dalam-ruu-kuhap-lt683d250b2b3f6/>

Hukum online, “*Plea bargaining dan DPA ‘Jalur Khusus’ Selamatkan Aset Negara*” diakses pada 25 Agustus 2025 pukul 20.00 WIB di halaman <https://www.hukumonline.com/berita/a/plea-bargaining-dan-dpa-jalur-khusus-selamatkan-aset-negara-lt66a7a81a5b12b/>

Institute for Criminal Justice Reform, “*Perjalanan Rancangan KUHP*,” Diakses pada 25 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB di halaman <https://icjr.or.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>

Legal Information Institue, “*Rules 11 Pleas*” Cornell Law School, diakses pada 20 Oktober 2025 di halaman https://www.law.cornell.edu/rules/frcmp/rule_11

Nusa Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. “*Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan Berkualitas*”. Diakses pada 18 Januari 2025 pukul 15.30 WIB di halaman <https://leip.or.id/pembatasan-perkara/>

Nusa Putra University, “*Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Diakses pada 18 Januari 2025 pada pukul 16.00 WIB di halaman <https://law.nusaputra.ac.id/artikel/mediasi-penal-sebuah-transplantasi-hukum-dalam-sistem-peradilan-pidana/>

Office of Public Affairs US Department of Justice. “*Justice Department*

Announces Distribution of Over \$158,9M to Nearly 25,000 Victims of Madoff Ponzi

Scheme”. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 16.00 WIB

di halaman <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces->

[distribution-over-1589m-nearly-25000-victims-madoff-ponzi](https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-distribution-over-1589m-nearly-25000-victims-madoff-ponzi)

Sidhartha Mohapatra dan Hailshree Saksena, “*Plea Bargain: A Unique Remedy*”, diakses diakses pada 25 Juli 2025 pukul 16.00 WIB di halaman <http://indlaw.com>.

Suci Rizka Fadhilla. “*Plea bargaining Vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?*” Diakses pada 18 Januari 2025 pukul 16.00 WIB di halaman <https://literasihukum.com/jalur-khusus-atau-plea-bargaining-system/>.

KONVENSI INTERNASIONAL

Codice di Procedura Penale (CPP), 1865.

Comprehensive Crime Control Act, 1984.

Federal Rules of Criminal Procedure Rule Act No. 11, 1944.

French Criminal Code of Procedure (CCP), 1957.

Prosecution Guidelines masing-masing Office of the Dorector of Public Prosecutions (ODPP), 1986.

Public Prosecution Service of Canada (PPSC), 2006.

Strafprozessordnung (StPO), 1879.

KAMUS

Black's Law Dictionary, 12th Edition, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, 2023.

